



ASEAN
INDONESIA
2023



Workshop Aplikasi e-Monev untuk Bappeda dan Satker

Direktorat Sistem dan Prosedur PEPP
Kedeputian PEPP – Bappenas

Bali, 22 Mei 2023



ASEAN
INDONESIA
2023

Tujuan dan Fokus Workshop

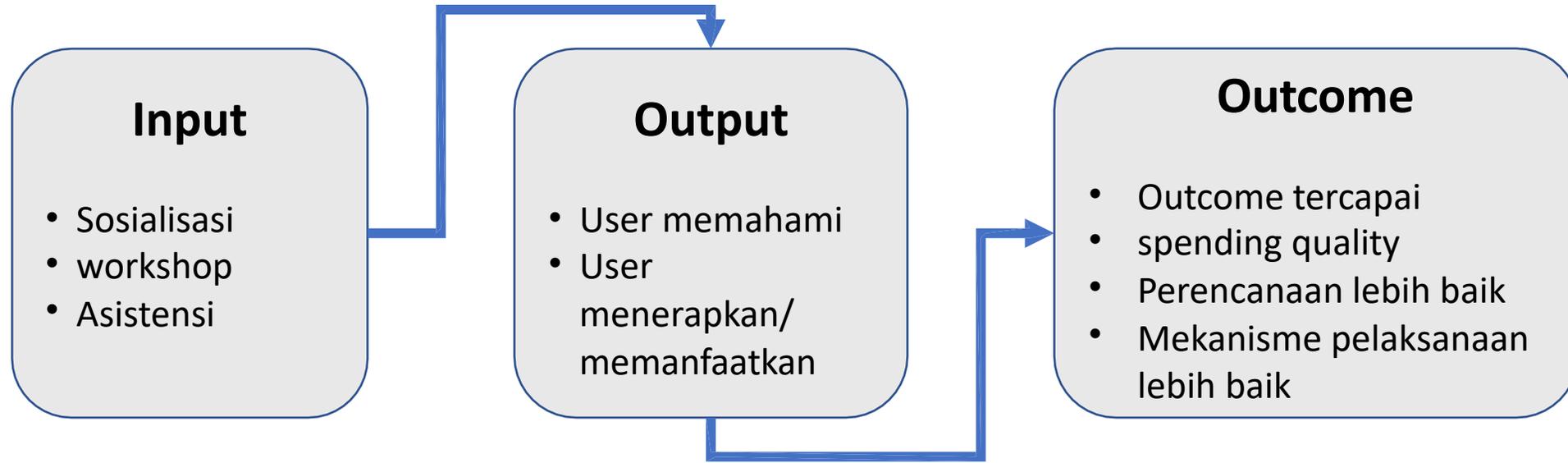
Memberi pemahaman kepada user aplikasi e-Monev terkait penggunaan dan pemanfaatan aplikasi dalam kerangka dukungan terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

Fokus pada penyamaan persepsi mengenai bisnis proses e-monev dan pendekatan entri data dalam kerangka kualitas dan validitas data





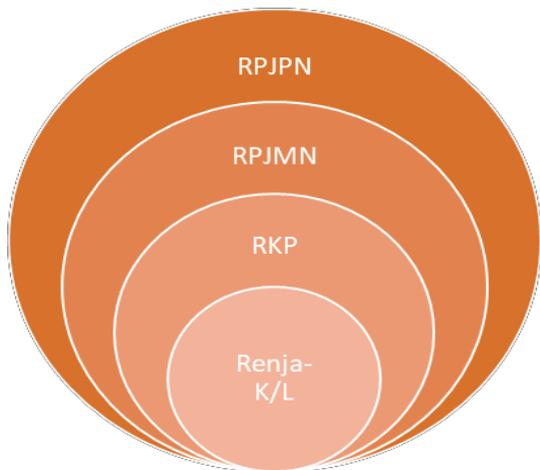
Agenda Workshop



- Agenda**
1. Konseptual dan kontekstual pemantauan dan pelaporan dalam kerangka e-Monev
 2. Simulasi penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-Monev user K8 dan K6

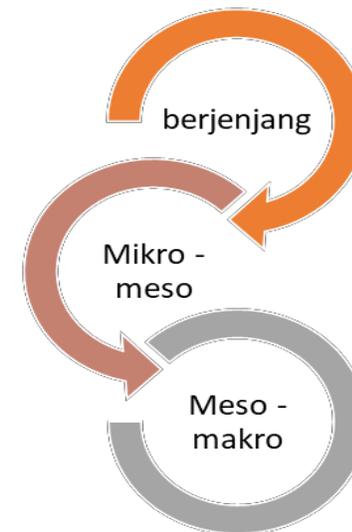
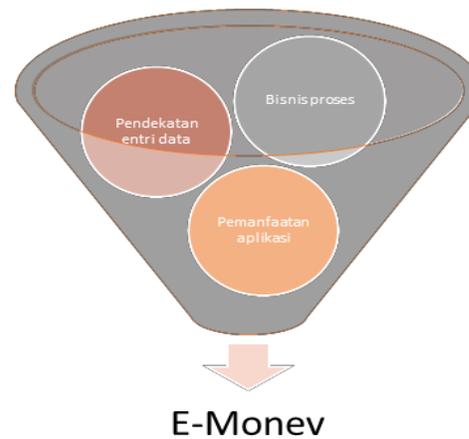


Framework e-Monev dalam Pembangunan



Pemahaman atas intervensi pemerintah:

1. **Bisnis Proses**
2. **Regulasi**
3. **Tupoksi**
4. **wewenang**
5. **Penganggaran**
6. **Pencatatan**
7. **Lingkungan strategis**



**Perencanaan/
penganggaran**

Intervensi pemerintah

- **Intervensi pemerintah via K/L (Renja-K/L)**
- **Prioritas nasional by tagging**
- **Major Project**
- **PEN**

Pemantauan

Pemantauan atas pelaksanaan Intervensi pemerintah dan relasinya terhadap RKP melalui tagging intervensi terhadap Prioritas Nasional

Aplikasi e-Monev

Pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah

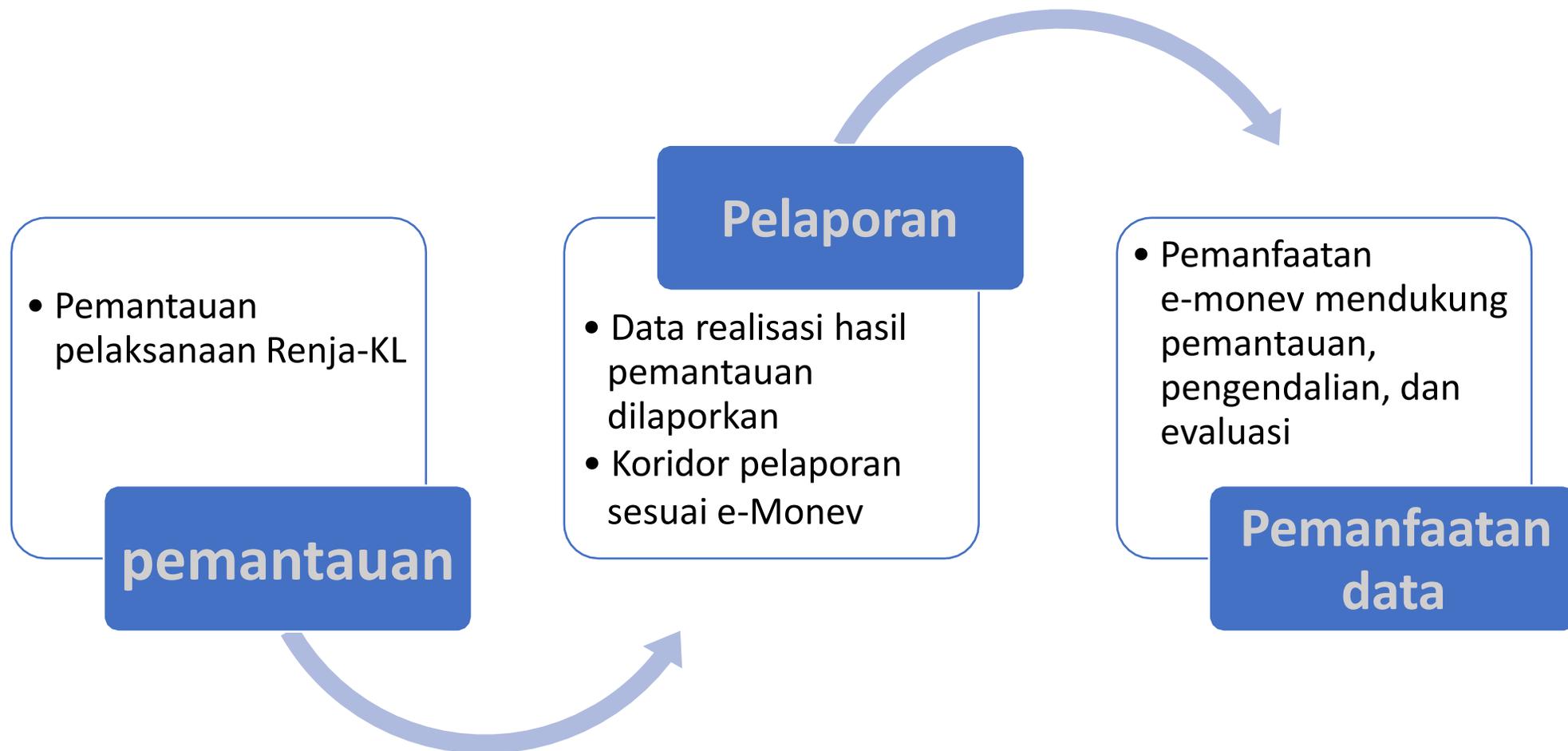
Pemanfaatan Data

Pemanfaatan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah, untuk :

1. Pemantauan lebih lanjut
2. Pengendalian
3. Evaluasi



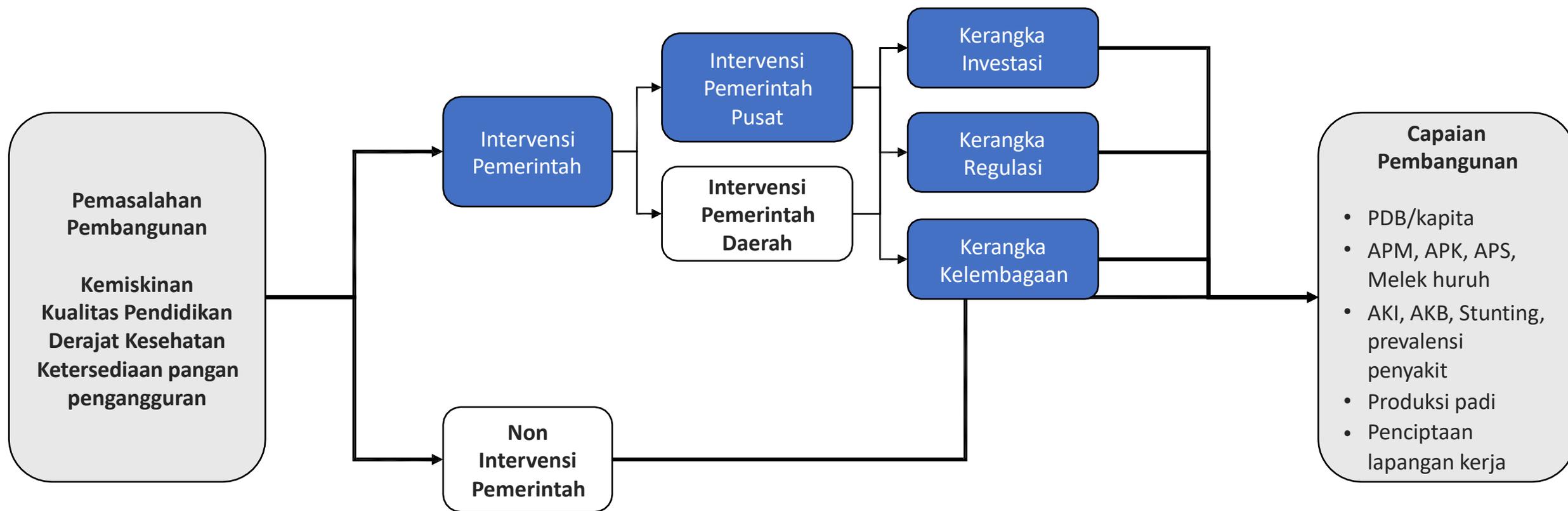
Konseptual e-Monev (1)



Ketiga aktivitas ini merupakan sebuah rangkaian kesatuan (ban berjalan), sehingga manfaat dari aktivitas pemantauan, pelaporan dan pemanfaatannya mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan belanja yang berkualitas (*value for money*)



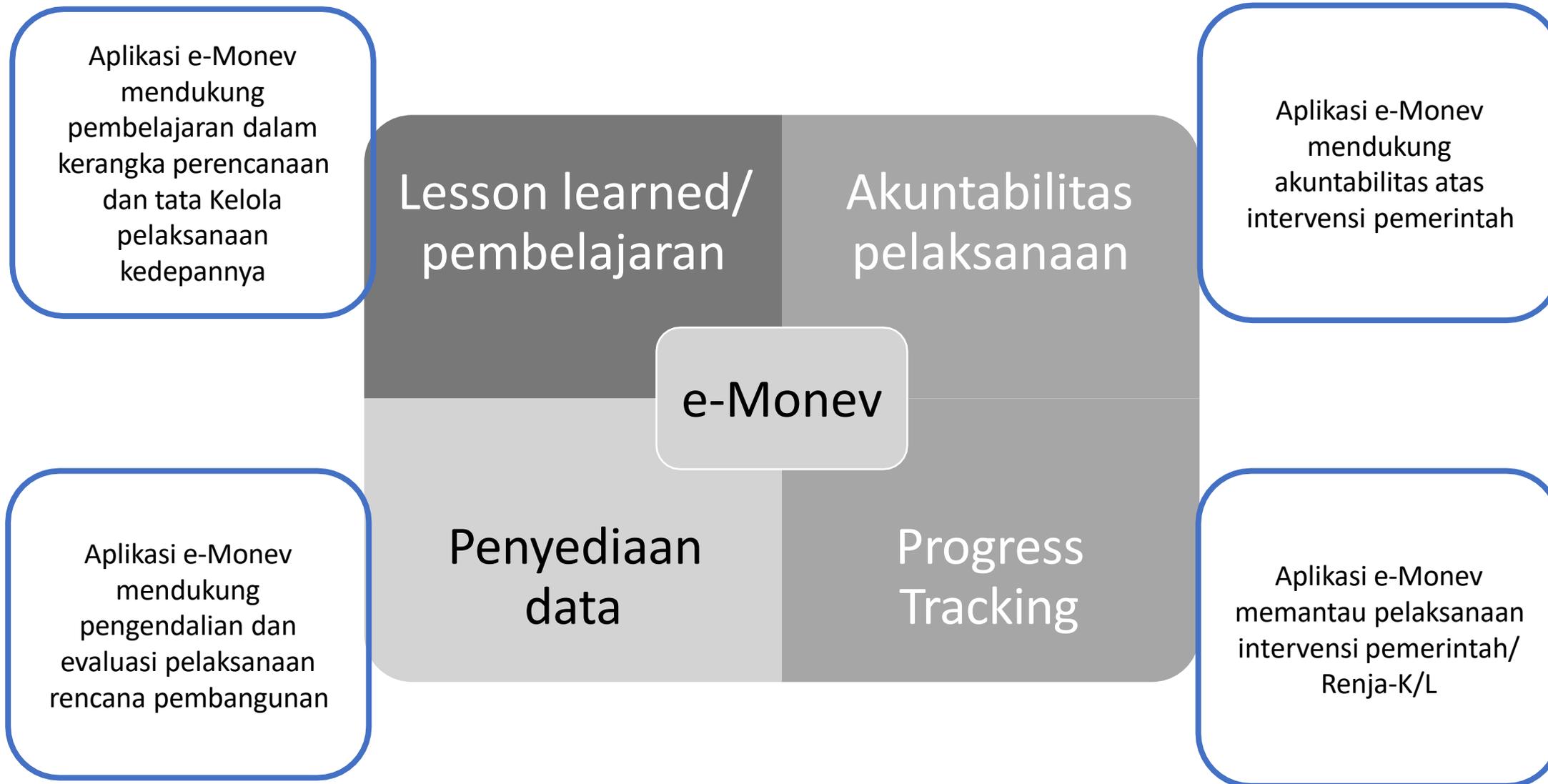
Konseptual e-Money (2)



Ruang lingkup aplikasi e-Money sementara terbatas pada intervensi pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui kementerian Lembaga. Termasuk didalamnya adalah terhadap intervensi pemerintah yang mendukung pelaksanaan prioritas nasional (RKP)



Konseptual e-Monev (3)



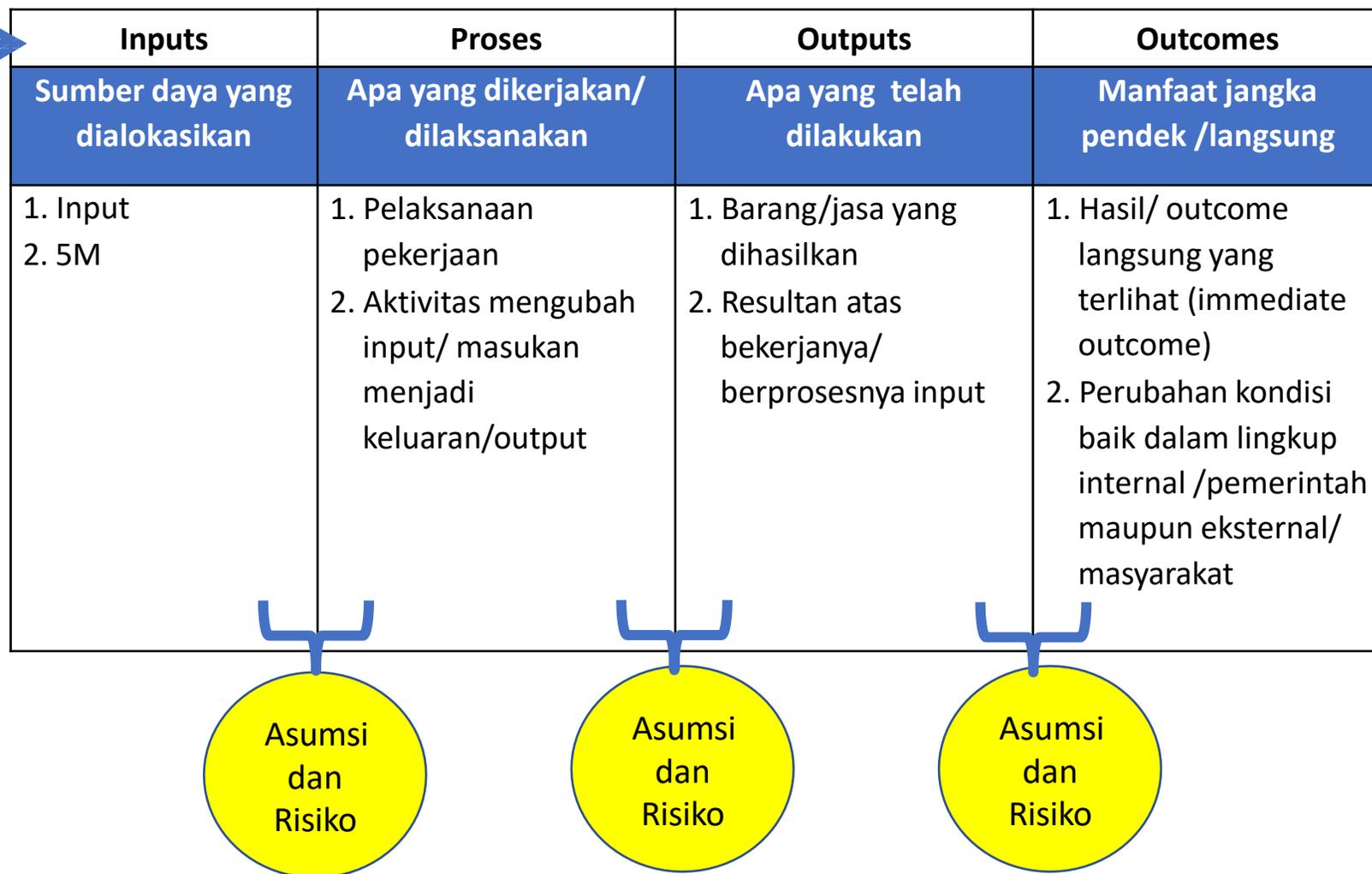


Pendekatan e-Monev (1)

Result Framework

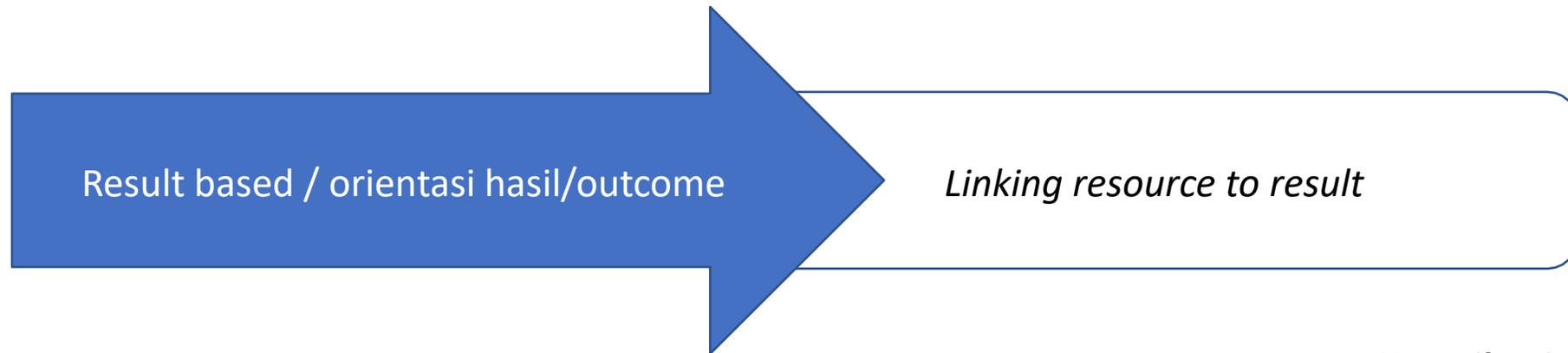


Logical Framework

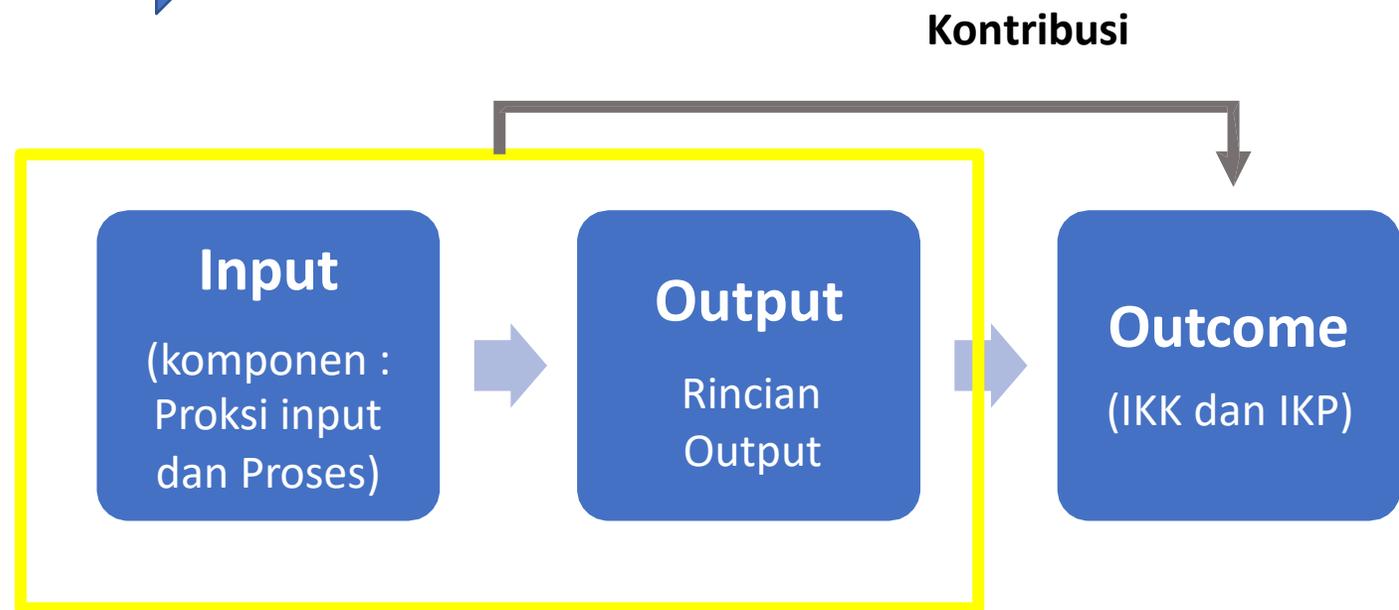




Pendekatan e-Monev (2)



Pendekatan ini sejalan dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (PBB), dimana seluruh program dan kegiatan berorientasi pada hasil/result/outcome





Pendekatan e-Monev (2)

Result based / orientasi hasil/outcome

Regulasi

UU 17 tahun 2003

1. azas pelaksanaan keuangan negara :
akuntabilitas berorientasi pada hasil
- 2 dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik adalah **penerapan anggaran berbasis prestasi kerja**
- 3 Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang **bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD, dari segi manfaat/hasil (outcome).**

UU 25 tahun 2004

- 1 Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. **Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact).**
- 2 Asas “akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan **hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan** kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3 Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang dan jasa dan terhadap hasil (outcomes) program pembangunan yang berupa dampak dan manfaat.

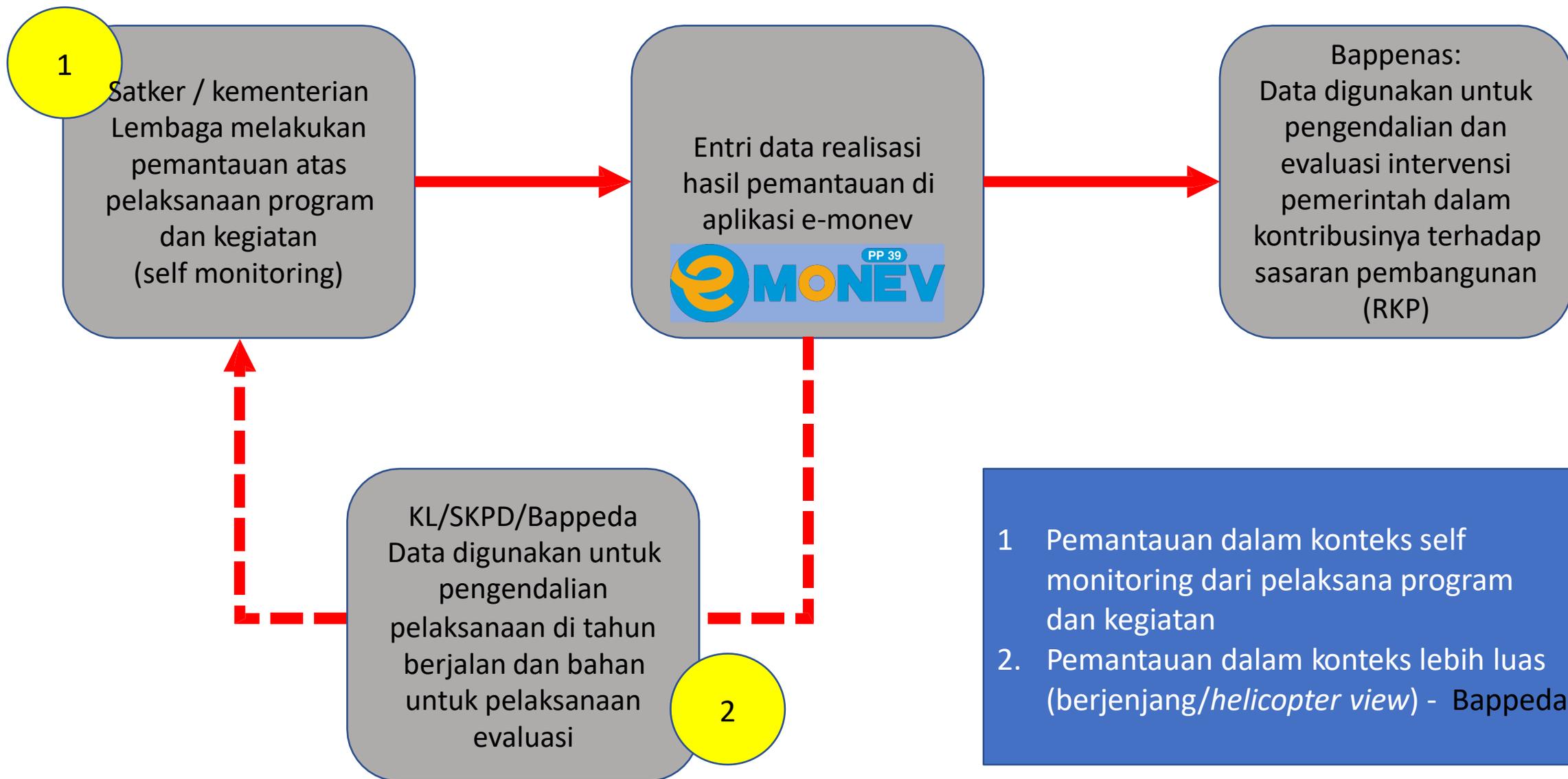


ASEAN
INDONESIA
2023

Pemantauan dan pelaporan e-Money



Pemantauan dan pelaporan (1)





Pemantauan dan pelaporan (2)

Desain Kebijakan/Program/Kegiatan/Intervensi Pemerintah		
Konsep Pembangunan	Desain intervensi (Pembangunan)	
Menerjemahkan konsep pembangunan kepada konsep kebijakan (Perencanaan pembangunan)	Menerjemahkan konsep kebijakan kepada program dan kegiatan	Dokumen pelaksanaan kebijakan / program dan kegiatan
RPJP/RPJM/RKP	RENJA	RKA
Makro	Meso	Mikro

Dalam konteks e-Monev pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan Renja K/L

Pemantauan pelaksanaan Renja-K/L secara utuh, mulai dari input-output-outcome, pun demikian dengan pelaporannya di aplikasi e-Monev



Pemantauan dan pelaporan (3)



Pemantauan dan pelaporan dalam konteks e-Monev dilakukan terhadap ketiga entitas ini, input-output-outcome

E-Monev membagi peran antar user dalam pemantauan dan pelaporan ini

Aplikasi e-Monev membagi user berdasarkan tupoksinya, secara garis besar terbagi menjadi kelompok user entri data dan kelompok user pemanfaat data.



Pemantauan dan pelaporan (4)

Kelompok user entri data

User
K5

User
K8

Input
(komponen)

User
K5

User
K8

Output
(Rincian Output / RO dan RO
Satker)

User
K4

User
K5

Outcome
(Indikator Kinerja : IKK, IKP, IKSS)

Kelompok user pemanfaat data

User
K8

User
K7

User
K6

User
K5

User
K4

User
K3

User
K2

User
K8

User
K7

User
K6

User
K5

User
K4

User
K3

User
K2

User
K5

User
K4

User
K3

User
K2



Pemantauan dan pelaporan (5)

Masa pemantauan

Tahun pelaksanaan

Masa pelaporan (entri data bulanan di aplikasi e-Monev)

Obyek pelaporan	Waktu pelaporan	Pelaksana Pelaporan
Komponen	Setiap bulan	PJ kegiatan (UKE-2) dan satuan kerja pelaksana Renja-KL
RO (termasuk RO satker)	Setiap bulan	
Indikator Kinerja	Disesuaikan dengan ketercapaian dan ketersediaan data indicator kinerja	PJ Program dan Kegiatan (UKE-1, UKE-2)



Pemantauan dan pelaporan (6)

Khusus untuk komponen, User e-Monev harus menetapkan secara mandiri (karena keterbatasan dalam dokumen RKAKL)

Referensi target RO bersumber dari Renja-K/L dan RKAKL

Referensi target RO bersumber dari Renja-K/L

Pemahaman bisnis proses program dan kegiatan diperlukan untuk dapat menetapkan target komponen.

Aplikasi e-Monev membantu proses ini dengan menampilkan target rincian output dan indicator kinerja sebagai referensi

Input

(komponen : Proksi input dan Proses)

Barang dan jasa



Output

Rincian Output

Barang dan jasa



Outcome

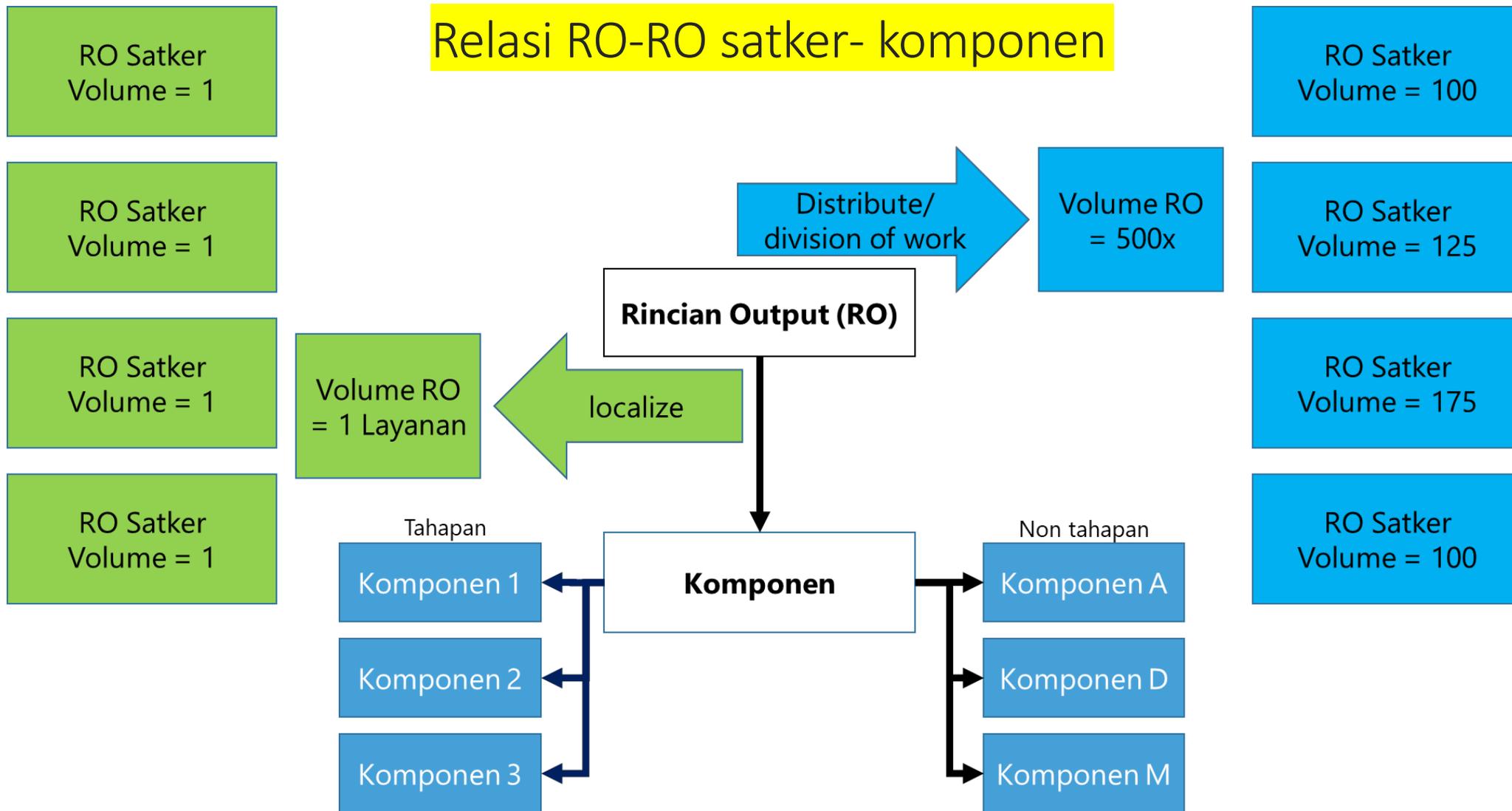
(IKK dan IKP)

Perubahan kondisi sebagai resultan bekerjanya input dan output



Pemantauan dan pelaporan (7)

Relasi RO-RO satker- komponen



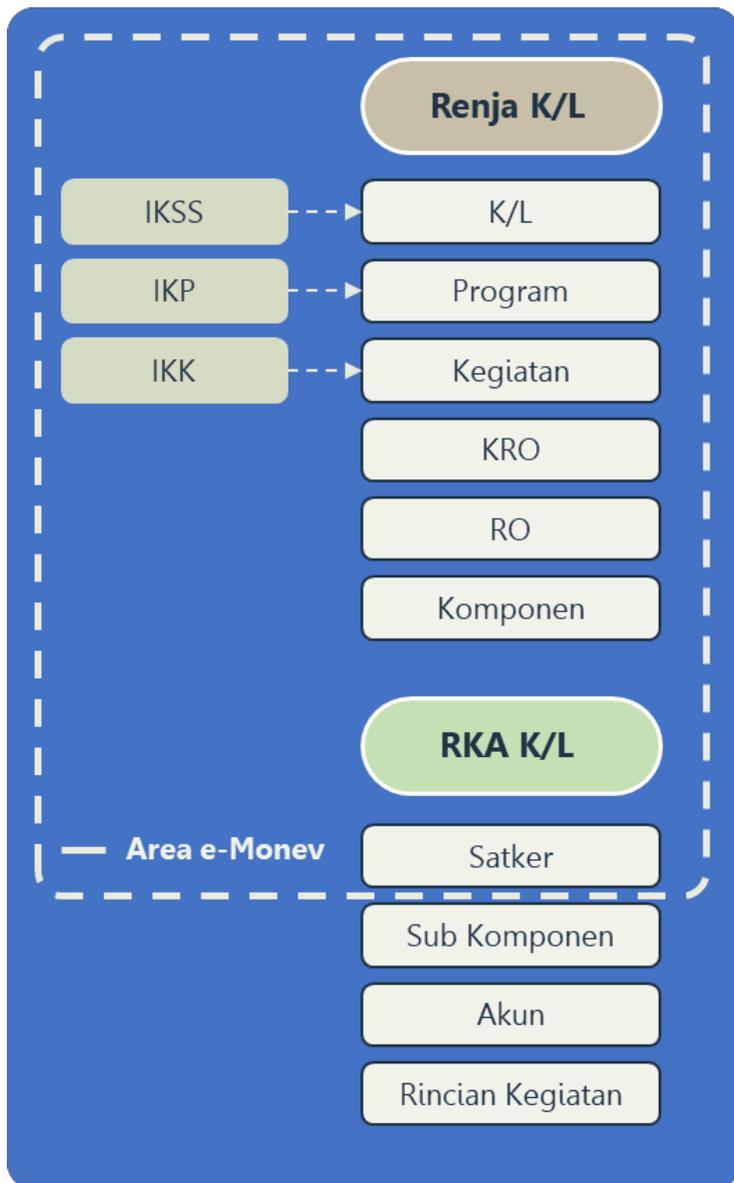


ASEAN
INDONESIA
2023

Pemahaman Bisnis Proses Program dan Kegiatan dalam kerangka dan koridor aplikasi e-Monev



Pemahaman Bisnis Proses (1)



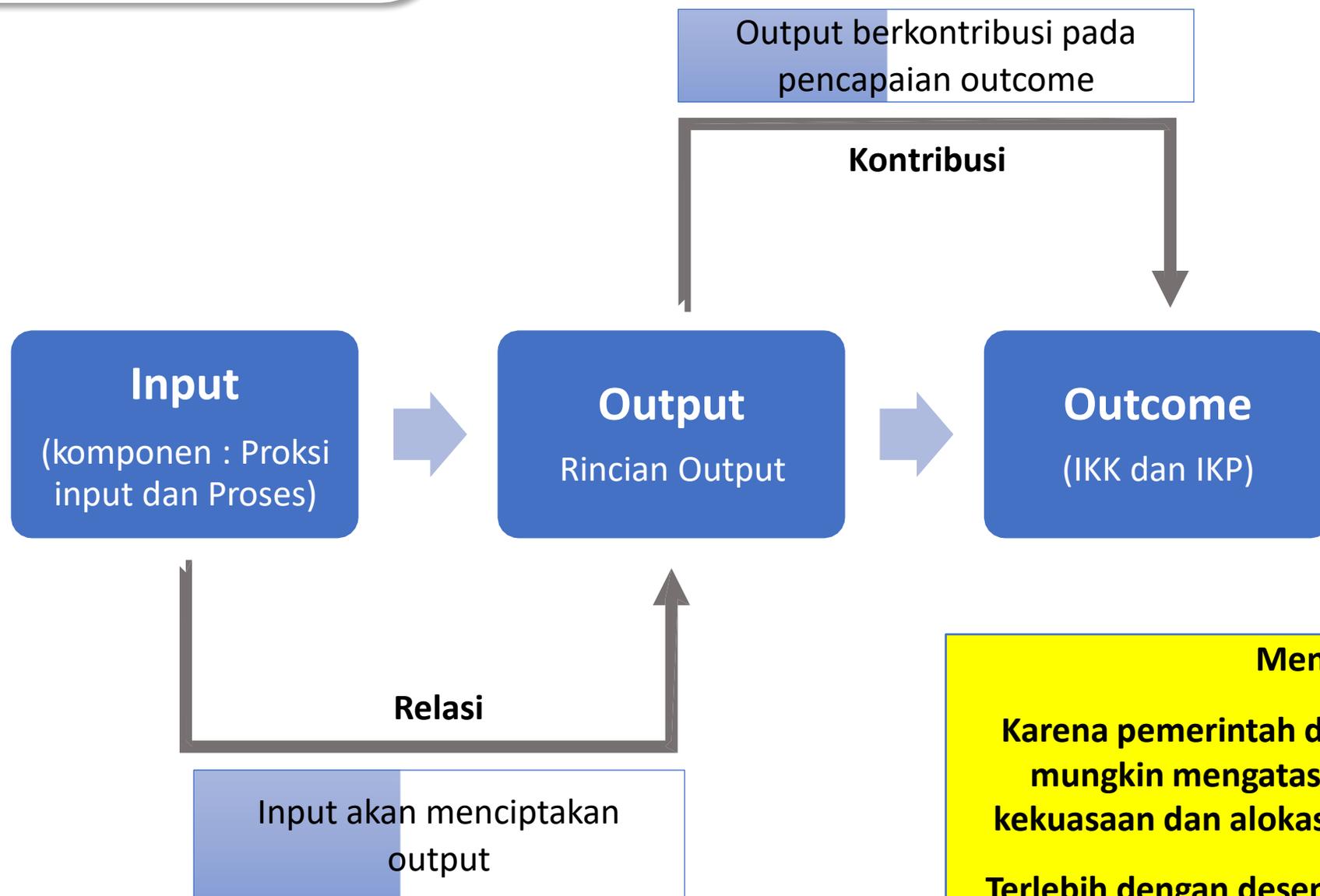
Memahami struktur intervensi pemerintah dalam hal ini Renja-K/L menjadi penting karena sebelum melakukan pemantauan dan pelaporan idealnya kita mengetahui apa yang akan dipantau dan dilaporkan datanya

Aplikasi e-Monev menggunakan dua data referensi, yakni Renja-K/L dan RKAKL

Saat ini kami sedang proses sinkronisasi data antara Bappenas dan kementerian keuangan, sehingga untuk realisasi anggaran sementara masih dientrikan manual oleh user e-Monev



Pemahaman Bisnis Proses (2)



Pemahaman bisnis proses program dan kegiatan (Intervensi pemerintah) mutlak diperlukan ketika melakukan pemantauan, sehingga entri data dapat dilakukan dengan baik

Mengapa kontribusi

Karena pemerintah dengan segala keterbatasan tidak mungkin mengatasi semua Permasalahan dengan kekuasaan dan alokasi sumberdaya yang ada yang ada

Terlebih dengan desentralisasi, maka peran pemerintah terbagi antara pusat dan daerah



Pemahaman Bisnis Proses (3)



**Proyek
(secara umum)**



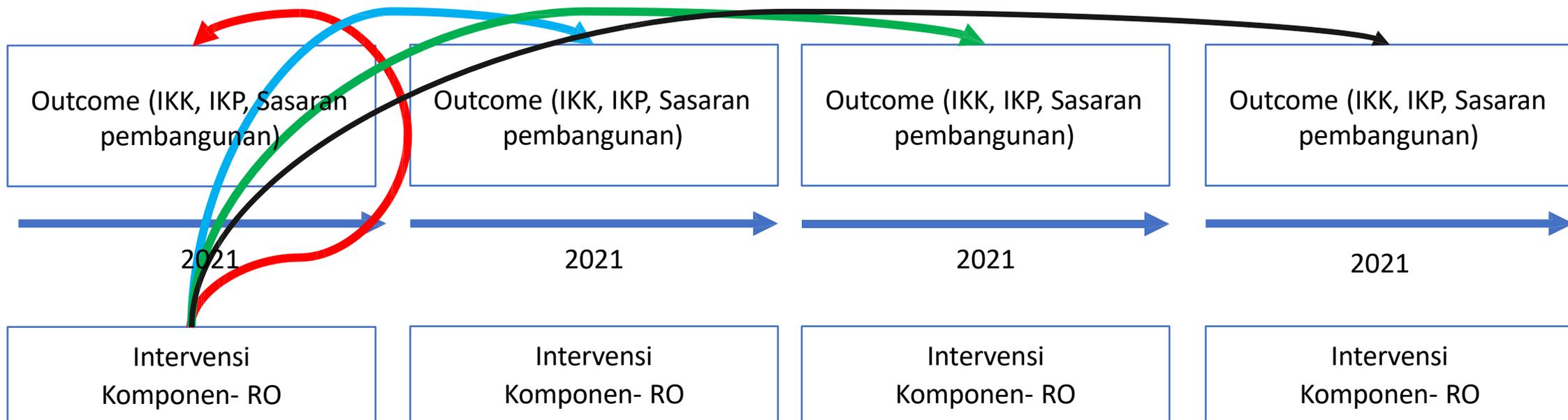
**Proyek pemerintah
(secara umum)**



**Proyek dunia
Pendidikan,
pertanian, dan
lainnya**



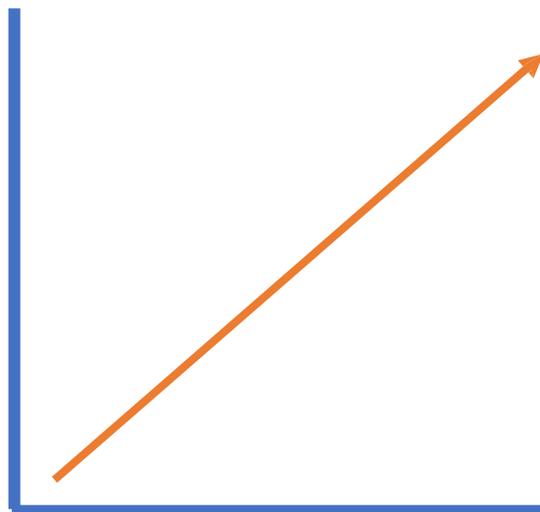
Pemahaman Bisnis Proses (3)



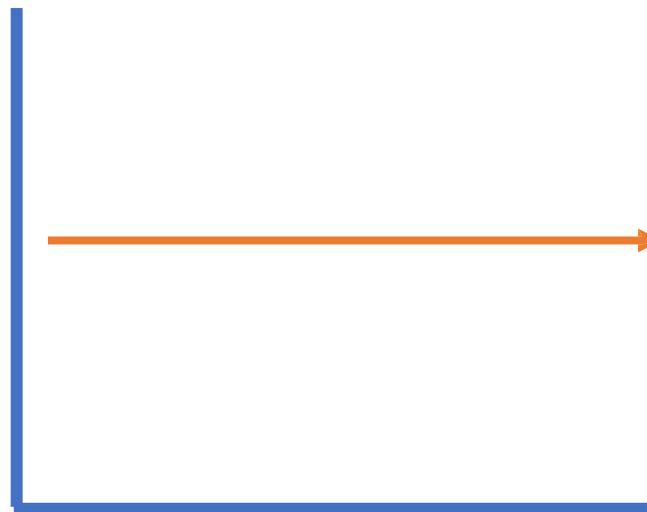


Pemahaman Bisnis Proses (4)

Secara umum, terdapat dua model intervensi, yakni bersifat layanan dan bersifat pengadaan/ pembangunan. Kedua model ini seharusnya dipahami dalam kerangka pembangunan, yakni kerangka investasi/pelayanan, regulasi, dan kelembagaan



Bisnis proses program dan kegiatan yang bersifat pengadaan/pembangunan menggambarkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat tahapan (tahapan aktivitas/pekerjaan) dengan tujuan keluaran yang dapat berkontribusi pada outcome



Bisnis proses program dan kegiatan yang bersifat layanan, dapat ditemui pada banyak fungsi pemerintahan dan juga pembangunan. Model bisnis proses ini menggambarkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat kontinyu/periodik seperti pelayanan, penampungan, pemberian bantuan, beasiswa dan lainnya dalam kerangka pencapaian outcome



Pemahaman Bisnis Proses (5)

IKK : Jumlah perangkat tata kelola destinasi dan pariwisata berkelanjutan yang siap diimplementasikan (19 lokasi)

RO	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
<ul style="list-style-type: none"> • 4313.FBA • Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah • Vol : 34 Provinsi 	<p>Pemetaan dan persiapan pelaksanaan fasilitasi di 34 Provinsi dalam bentuk MoU kerjasama dengan 34 Dinas Pariwisata dan Bappeda provinsi di 34 Provinsi</p> <p>Progress dapat pula ditambahkan dalam persentase dengan mempertimbangkan besar kontribusi di masing masing triwulan terhadap pencapaian target RO</p> <p>Progress 40%</p>	<p>Proses fasilitasi dan pembinaan melalui proses pendampingan kepada 34 Dinas Pariwisata dan Bappeda provinsi di 34 Provinsi (awal penerapan MoU)</p> <p>Progress 20%</p>	<p>Proses fasilitasi dan pendampingan melalui piloting terhadap satu destinasi pariwisata di 34 Provinsi</p> <p>Progress 25%</p>	<p>Proses fasilitasi dan pendampingan melalui piloting terhadap satu destinasi pariwisata di 34 Provinsi</p> <p>Progress 15%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan 		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #a0c0ff; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Pemahaman bisnis proses merujuk pada Renja-K/L (komponen, RO dan IKK/IKP)</p> </div>		



Pemahaman Bisnis Proses (6)

IKK : Termanfaatkannya aplikasi SRIKANDI menjadi layanan kearsipan di K/L (87 K/L)

RO	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
<p>: Instansi Pusat yang menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Berbasis Elektronik (Srikandi) Indikator: Jumlah Instansi Pusat yang Menerapkan Aplikasi Kearsipan Berbagi Pakai Elektronik (Srikandi) Target: 53 Lembaga</p>	<p>53 Lembaga sudah menginstall Srikandi</p> <p>Dalam persentase : 20%</p>	<p>53 Lembaga sudah menerapkan minimal 1 fitur (dari 4 fitur yang tersedia), yaitu penciptaan arsip, untuk semua divisi/direktorat dalam Lembaga tersebut</p> <p>Dalam persentase : 20%</p>	<p>53 Lembaga sudah menerapkan minimal 3 fitur (dari 4 fitur yang tersedia), yaitu penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penggunaan arsip oleh yang berhak, untuk semua divisi/direktorat dalam Lembaga tersebut</p> <p>Dalam persentase : 20%</p>	<p>53 Lembaga sudah menerapkan 4 fitur yang tersedia, yaitu penciptaan arsip, pemeliharaan arsip, penggunaan arsip oleh yang berhak, dan penyusutan arsip, untuk semua divisi/direktorat dalam Lembaga tersebut</p> <p>Dalam persentase : 20%</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan 				



ASEAN
INDONESIA
2023

Pendekatan Entri Data e-Money



Pendekatan entri data (1)

Progress pelaksanaan dengan status pelaksanaan serta nilai persentasenya (kumulatif)

Entri data realisasi setiap bulan dengan nilai absolut dan parsial untuk realisasi fisik komponen dan RO

Entri data sesuai dengan jenis dan sifat indikator

Input

(komponen : Proksi input dan Proses)

Output

Rincian Output

Outcome

(IKK dan IKP)

Barang dan jasa

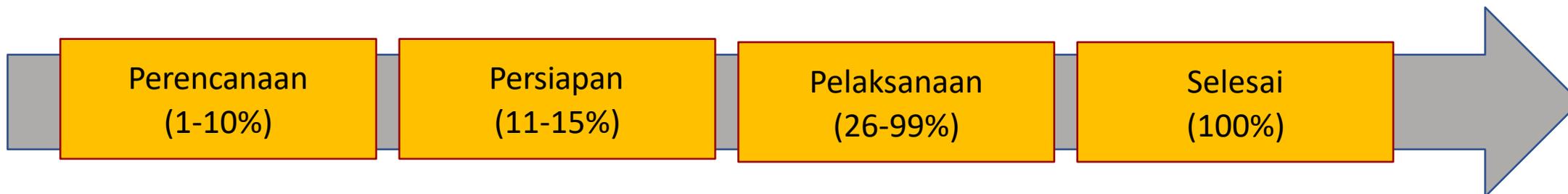
Barang dan jasa

Perubahan kondisi sebagai resultan bekerjanya input dan output



Pendekatan entri data (2)

	Perencanaan	Persiapan	Pelaksanaan	Selesai
Pengadaan Barang/Jasa	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa. Menetapkan Dokumen Pengadaan. Menetapkan besaran nominal Jaminan penawaran. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I atau papan pengumuman resmi. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk. kontrak telah ditandatangani/ ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan sesuai Kontrak sudah diterapkan/ dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> Fisik 100% telah selesai.
Pekerjaan Swakelola	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun jadwal rencana pelaksanaan/ implementation plan tahun berjalan berdasarkan TOR/Juknis/juklak Menyusun rincian pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana tindak berdasarkan rencana pelaksanaan Pelaksanaan rapat-rapat Verifikasi data penerima bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan pekerjaan. Kunjungan lapangan. Pengambilan data. Penulisan laporan. Penyaluran bantuan. 	<ul style="list-style-type: none"> Pekerjaan sudah selesai 100 persen, sesuai dengan volume komponen/ rincian output yang ditetapkan.





Pendekatan entri data (3)

1. Status pemanfaatan “dimanfaatkan” dapat dipilih ketika sudah ada realisasi dari komponen atau RO
2. Status pemanfaatan dapat dipilih pada saat target terealisasi sebagian atau ketika target sudah terealisasi seluruhnya
3. Status pemanfaatan merupakan atribut yang menyatakan apakah pekerjaan atau hasilnya sudah dimanfaatkan atau belum
4. **Pada saat pelaksanaan apabila status pemanfaatan adalah “dimanfaatkan”, maka hingga akhir tahun pelaksanaan akan tetap dimanfaatkan**

Banyaknya variasi program kegiatan dana keterbatasan pelaksanaan tahunan, maka status pemanfaatan ini merupakan sebuah proksi yang dapat membantu Analisa mendukung pengendalian dan evaluasi

Untuk komponen dan RO generik, status dimanfaatkan dientrikan pada bulan Januari. Hal ini mempertimbangkan bahwa pekerjaan yang bersifat generic dilakukan secara terus menerus selama tahun pelaksanaan

Dimanfaatkan ketika keluaran dari pekerjaan sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat.

Dapat pula ketika keluaran dari satu komponen dimanfaatkan oleh komponen lain, dalam kerangka model komponen adalah tahapan pelaksanaan



Pendekatan entri data (4)

Selain pendekatan entri data pencatatan parsial dan nilai absolut, status pelaksanaan dan status pemanfaatan, user e-monev juga melakukan entri untuk Permasalahan dan bukti ukung (opsional)

Kategori Permasalahan :

1. Anggaran
2. Barang/Material.
3. Penerima manfaat.
4. Waktu.
5. Lokasi.
6. Desain Perencanaan/konsep.
7. Cara/Metode Pelaksanaan.
8. Aparatur Pemerintahan.
9. *Stakeholder* terkait.
10. Persepsi/ Pengendalian.

Bukti Dukung - opsional



Dokumen, upload



Foto, tautan (url)



Video, tautan (url)



ASEAN
INDONESIA
2023

Ilustrasi pemanfaatan e-Money



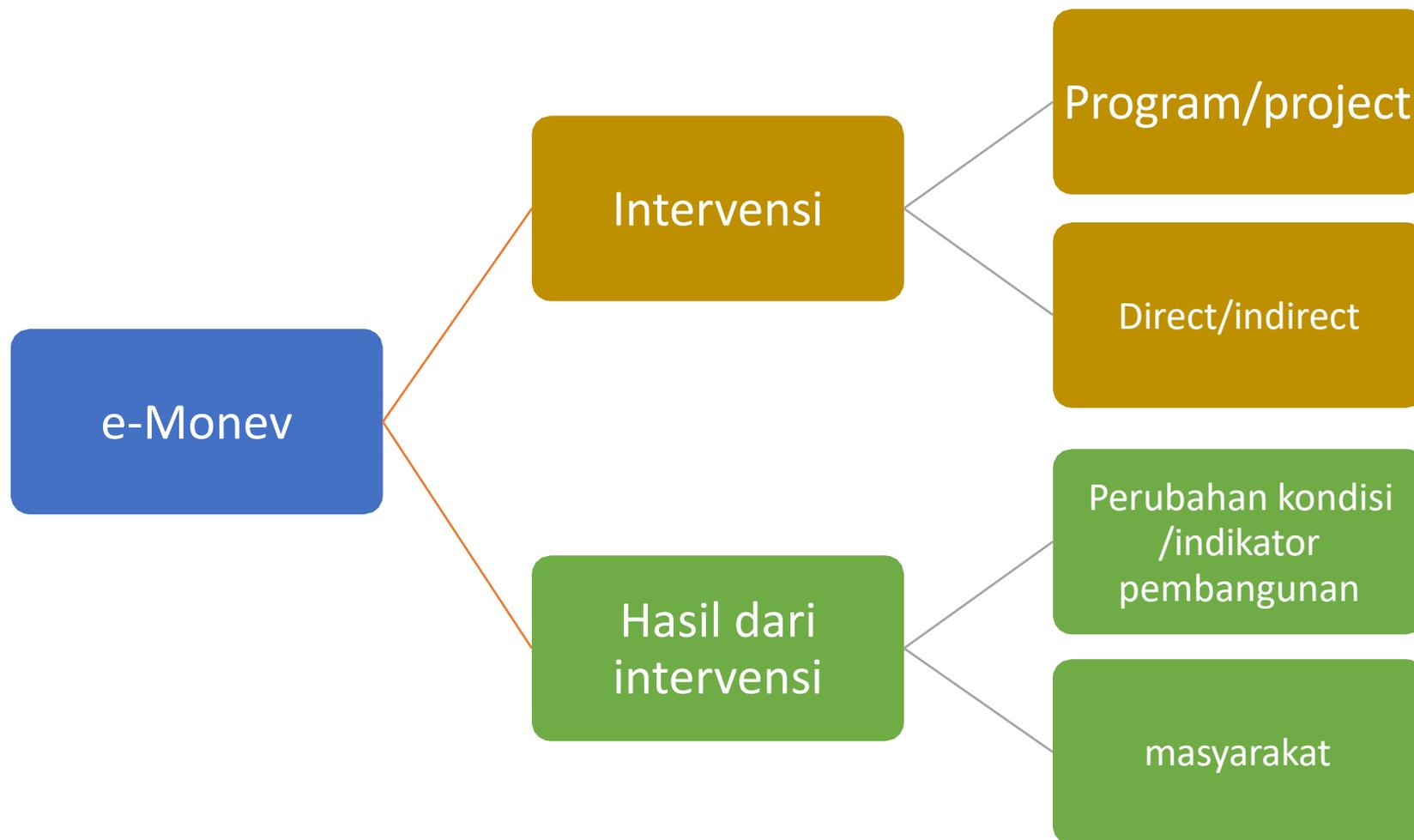
Ilustrasi pemanfaatan e-Monev (1)

eE-Monev menyediakan data yang dapat diolah / dianalisa Kembali untuk mendukung pelaksanaan pemantauan (lebih lanjut, *helicopter view*), pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan

Data di aplikasi e-Monev merupakan salah satu data yang seharusnya digunakan Bersama sama dengan pemahaman bisnis proses, data sectoral/regional/register, pemahaman lingkungan strategis. Hal ini sesuai dengan pendekatan kerangka logika dan sesuai dengan karakteristik sector public yang berbeda dengan sector privat/swasta



Ilustrasi pemanfaatan e-Monev (2)



E-Monev saat ini hanya mengukur kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan

Kinerja belum dapat diukur secara langsung di aplikasi, karena konsep kinerja dalam Renja-K/L adalah berfungsinya output dalam berkontribusi pada pencapaian outcome



Ilustrasi pemanfaatan e-Monev (3)



Pengadaan kapal penangkap ikan
100 unit

Komponen :
Bodi kapal
Mesin
Alat penangkap ikan
Alat navigasi
Bantuan bahan bakar



Outcome/dampak

- Meningkatnya produksi ikan tangkap (200 ton – 400 ton/tahun)
- Meningkatnya pendapatan nelayan (3jt – 5 jt /bulan)
- Meningkatnya nilai tukar nelayan (98-101)
- Menurunnya angka kemiskinan sector perikanan tangkap

komponen	Rencana	Pelaksanaan
Bodi kapal	200 jt	170 jt
Mesin	120 jt	70 jt
Alat penangkap ikan	25 jt	15 jt
Alat navigasi bantuan	10 jt	5 jt
Bantuan bahan bakar	30 jt	30 jt
	385 Jt	290 jt



Refocusing/
pemotongan
38,5 M → 29 M
(25%)

Jika anggaran refocusing, output tetap atau berkurang, seharusnya dapat melihat kepada outcome sebagai rujukan (not just sent tapi delivered)

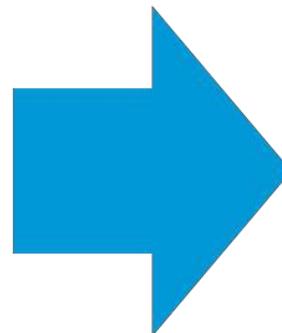


Ilustrasi pemanfaatan e-Money (3)



Pengerukan Pelabuhan/Kolam
Peabuhan/Pengerukan Sungai

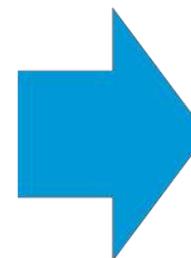
Komponen :
Pengerukan
(kontraktual)



Outcome/dampak

- Kapal dengan tonase tertentu dapat bersandar
- Meningkatnya lalu lintas barang
- Menurunnya ongkos transportasi (25%)
- Menurunnya harga barang- produk (35%)
- Terkendalinya inflasi

Pengerukan	A-SEP	OK-MAR
output	Tercapai	Tercapai
outcome	Tercapai	Kemungkinan tidak tercapai



Timing pengerukan
A-SEP
OK-MAR

Jika pelaksanaan tidak sesuai dengan timing/lingkungan strategis, output akan tercapai, namun apakah outcome dapat tercapai (not just sent tapi delivered)



ASEAN
INDONESIA
2023

Ilustrasi pemanfaatan e-Money

E-Monev dan Peran Bappeda

Bappeda diberikan User untuk dapat memantau pelaksanaan Renja-K/L di wilayah kerjanya. Data dan informasi disajikan lengkap dari input (komponen) dan output.

PP 39/2006

Pasal 5, 6, 7 dan 8

(1) Kepala OPD menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas Pembantuan / dekonsentrasi

Pasal 6 dan pasal 8

1) Bappeda Kab/Kota dan Provinsi Menyusun laporan triwulanan terkait pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi

Saat ini dengan aplikasi e-Monev, pelaporan dilakukan secara bulanan dan diverifikasi oleh kementerian Lembaga secara triwulanan

Idealnya Bappeda juga diberikan fungsi verifikasi untuk pelaksanaan dekonsentrasi dan TP sebagai penerjemahan dari PP 39/2006

Namun saat ini kami belum menerapkan hal tersebut.

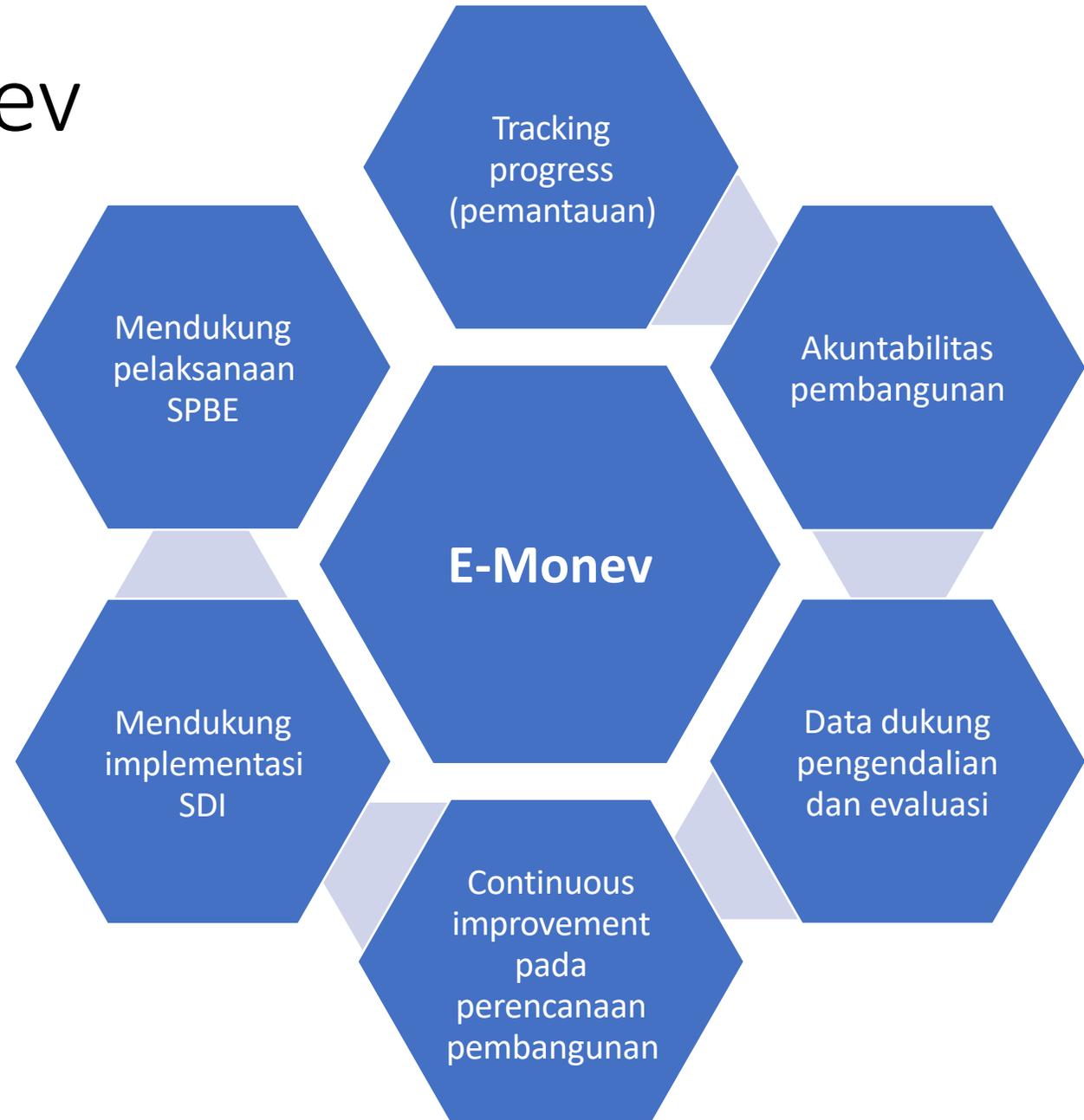
Kami berharap dapat berkoordinasi dengan Bappeda dalam kerangka mendorong OPD untuk melapor melalui aplikasi e-Monev, sehingga Bappeda melalui akun K6 dapat memantau dan mengendalikan pelaksanaan Renja-K/L (terutama Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayah kerjanya

Aplikasi e-Monev didesain untuk dapat menggantikan pelaporan secara manual, namun saat ini beberapa informasi belum optimal digunakan oleh user dalam melaporkan realisasi hasil pemanauannya. Jika diperlukan, Bappeda tetap dapat meminta pelaporan secara manual dari OPD pelaksana Renja-KL, atau Bappeda dapat mendorong OPD untuk dapat melaporkan secara lengkap di Aplikasi e-Monev dan melengkapinya dalam bentuk bukti dukung

Penguatan e-Monev

Aplikasi e-Monev dengan pendekatan kerangka logika, sesuai Renja-K/L seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan lain selain monev dal. Semakin beragam pemanfaatan maka aplikasi e-Monev akan menjadi aplikasi yang dibutuhkan

Pengembangan e-Monev kedepannya seharusnya bisa memperkuat pengendalian baik di OPD, K/L, Bappeda dan Bappenas





ASEAN
INDONESIA
2023

Terima Kasih